

ABSTRAK

DISKRESI KEPOLISIAN BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA (Studi Kasus Terhadap Mediasi Tindak Pidana Penganiayaan di Polres Sumenep)

Oleh : Imilda Aprilianti

Pembimbing Utama : Dr. Zainuri, S.H., M.H

Pembimbing Pendamping : Dr. Dian Novita, S.H., M.H

Kepolisian diberi kewenangan untuk mengambil tindakan saat situasi tertentu berdasarkan keyakinan serta penilaian mereka sendiri sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Salah satu tindakan diskresi kepolisian yakni merupakan proses mediasi dalam penanganan tindak pidana.

Rumusan masalah yang penulis gunakan yaitu bagaimana proses pelaksanaan diskresi kepolisian mengenai mediasi tindak pidana penganiayaan di Polres Sumenep, Bagaimana kemanfaatan pelaksanaan mediasi tindak pidana penganiayaan. Serta mempunyai tujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan mediasi dan mengetahui kemanfaatan yang diperoleh dari mediasi tindak pidana penganiayaan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *sosio legal* atau empiris yaitu penelitian berdasarkan observasi lapang dengan menggunakan pendekatan masalah studi kasus dan yuridis sosiologis. Jenis sumber data primer dan sekunder. Teknik memperoleh data dengan cara wawancara kepada responden. Teknik analisis data menggunakan kualitatif, deskriptif, dan induktif.

Hasil dari penelitian yang penulis lakukan adalah Polres Sumenep menggunakan hak diskresinya diantaranya yaitu melakukan mediasi mengenai tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan prosedur yang tetap. Dan terdapat beberapa manfaat dari pelaksanaan mediasi yaitu salah satunya adalah lebih menghemat biaya daripada dilanjutkan ke pengadilan.

Dapat disimpulkan diskresi merupakan wewenang yang harus dilaksanakan untuk kepentingan umum sesuai kewenangannya. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu anggota polisi tidak boleh menggunakan diskresi secara semena-mena, serta masyarakat harus memahami bahwa diskresi kepolisian merupakan bagian dari tugas polisi.

Kata kunci : Diskresi, Mediasi, Tindak pidana penganiayaan

ABSTRACT

POLICE DISCRETION BASED ON THE REGULATION OF KAPOLRI
NUMBER 6 OF 2019 ON CRIMINAL ACTION
(Case Study of Mediation of Criminal Acts of Abuse in Sumenep Regional Police
Station)

By: Imilda Aprilianti

Main Advisor: Dr. Zainuri, S.H., M.H

Counselor: Dr. Dian Novita, S.H., M.H

The police are given the authority to take action when certain conditions are based on their own beliefs and judgments as mentioned in article 18 paragraph (1) and paragraph (2) of Law number 2 of 2002 concerning the police of the Republic of Indonesia. One of the acts of police discretion is a mediation process in handling criminal acts.

The formulation of the problem raised uses how is the process of implementing the police's discretion regarding the mediation of criminal acts of persecution at the Sumenep Regional Police Station , What about the benefits of the implementation of mediation of criminal acts of persecution . As well as having the objective to find out the mediation implementation process and look for benefits derived from mediation of the persecution.

This type of research is socio-legal or empirical research that is research based on observations using case study problems and sociological jurisprudent. Primary and secondary data source types. Techniques of receiving data by interviewing respondents. Data analysis techniques using qualitative, descriptive, and inductive.

The results of the research that the author did was that the Sumenep District police used their discretionary rights about mediating acts of torture using fixed procedures. And there are several benefits of conducting mediation, one of which is more than the costs required for the court.

Disabling discretion is an authority that must be exercised in the public interest in accordance with its authority. Advice that can be given about police officers should not use discretion arbitrarily, so also the community must consider that police discretion is part of the police's duty.

Keywords: Discretion, Mediation, Crime of persecution